

EVALUASI PENERAPAN INTERNAL CONTROL BERDASARKAN KERANGKA COSO 2012 PADA DIVISI KARTU KREDIT DI BANK “X”

Oleh : Patricia Angela Santoso

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Email : cutey_copankz@yahoo.com

Abstrak - Setiap badan usaha yang sedang berkembang pasti memiliki *internal control* yang digunakan sebagai sarana pengendalian. Hal tersebut bertujuan agar kegiatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta mendukung pelaporan dan kepatuhan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Seringkali badan usaha menerapkan *internal control* berdasarkan kerangka COSO. Dan seiring dengan berkembangnya risiko yang ada di perusahaan, maka COSO pun melakukan pembaharuan atas komponen *internal controlnya*, khususnya penilaian atas *fraud risk* yang dapat membantu perusahaan dalam menilai celah terjadinya fraud dan dilakukan tindakan antisipasi. Penggunaan kerangka COSO 2012 ini akan dibandingkan dengan penerapan *internal control* yang secara nyata dilakukan oleh Bank “X” pada divisi kartu kredit karena melihat dari maraknya penggunaan kartu kredit dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, banyak sekali terjadi kasus gagal bayar *billing statement (delinquency)* untuk kartu kredit yang menyebabkan kerugian bagi Bank “X”. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa Bank X telah memiliki *internal control* yang memadai walaupun adanya kelemahan pada beberapa bagian tertentu. Oleh karena itu, Bank “X” dapat dikatakan telah memiliki *internal control* yang baik dan siap untuk menyongsong COSO 2012.

Kata kunci : COSO 2012, *internal control*, divisi kartu kredit Bank “X”

PENDAHULUAN

Menurut *survey* yang dilakukan oleh Hermiyatti (2010) pada 23 Direktur Rumah Sakit Umum dan Swasta di Bandung membuktikan bahwa terdapat pengaruh pada penerapan *internal control* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang. Dengan memaksimalkan kegiatan *internal control* maka dapat mencegah terjadinya *fraud*. Dan bagi Bank penerbit penyelenggaraan bisnis jasa kartu kredit menjadi bisnis yang menguntungkan. Berdasarkan SK Menkeu No. 1251/ KMK. 031/ 1998 yang menggolongkan bisnis kartu kredit sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan untuk membeli barang dan jasa, jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2009 meningkat sangat pesat. Pada bulan September 2007, jumlah

kartu kredit yang beredar berjumlah 8,8 juta. Pada Januari 2009, terjadi kenaikan sehingga jumlah kartu kredit yang beredar menjadi 11 juta.

Dengan pesatnya pertumbuhan pasar maka akan memberikan peningkatan jumlah kartu kredit dimana terjadi kecenderungan peningkatan volume transaksi. Namun harus diwaspadai *trend* kredit bermasalah (*Non-Performing Loan /NPL*) yang juga meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan volume transaksi kartu kredit. Tren NPL merupakan salah satu risiko yang harus dihadapi oleh Bank. Tren NPL kartu kredit cenderung naik walaupun mengalami fluktuatif. Tren NPL kartu kredit sempat terlihat turun hingga tahun 2006, namun setelah tahun 2006 NPL kartu kredit meningkat secara tajam hingga menembus lebih dari 12% antara kurun waktu akhir 2007 dan awal 2008. Dalam catatan yang diperoleh Kontan (2008), di awal tahun 2008, kredit macet bisnis kartu kredit di BNI sudah mencapai 11,26%. Adapun di Bank Mandiri mencapai 6%. Hal ini menandakan bahwa Bank telah melupakan prinsip *prudential banking* (kehati-hatian) dalam berkompetisi memasarkan kartu kreditnya (Ujang,2009).

Risiko kredit macet dapat diatasi melalui *internal control*, semakin baik kualitas *internal control* suatu organisasi maka semakin kecil pula risiko yang dihadapi. Kemudian hal tersebut juga didukung dengan penelitian Hermiyatti, dengan memaksimalkan kegiatan *internal control* maka dapat mencegah terjadinya *fraud*. Jika hal tersebut tidak didukung oleh prosedur *internal control* yang baik maka akan terjadi banyak kasus gagal bayar *billing statement* kartu kredit. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi terhadap penerapan *internal control*.

Salah satu *framework* pengendalian internal yang banyak digunakan oleh badan usaha adalah versi COSO. COSO pada tahun 2013 mendatang akan merilis versinya yang terbaru dan didalamnya meliputi pengendalian internal yang sudah *ter-update* sesuai perkembangan zaman. Pembahasannya pun lebih kompleks dibandingkan COSO 2004. Kemudian, COSO 2012 ini memiliki penilaian *fraud risk* sehingga perusahaan dapat melakukan antisipasi atas risiko sehingga mencegah

terjadinya *fraud* yang dapat menimbulkan kerugian dan pada tahun mendatang perusahaan yang ada pasti akan menggunakan versi terbaru COSO sebagai tuntutan standar internasional. Selain itu, COSO 2012 ini lebih cocok digunakan pada lingkungan saat ini yang erat kaitannya dengan risiko. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai standar *Committee of Sponsoring Organization (COSO) 2012*.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjawab keingintahuan peneliti dengan menjawab *mini research question* yang saling berhubungan dan pada akhirnya akan mampu menjawab *main research question* yang ada.

Main RQ : Bagaimana evaluasi penerapan *Internal Control* berdasarkan kerangka COSO 2012 pada divisi kartu kredit di Bank “X” ?

Mini RQ :

1. Bagaimana prosedur pengajuan aplikasi kartu kredit sampai penagihan?
2. Bagaimana kondisi *internal control* Bank “X” khususnya pada divisi kartu kredit saat ini?
3. Bagaimana perbandingan *internal control* Bank “X” dibandingkan kerangka COSO 2012?
4. Bagaimana dampak yang diakibatkan ketidaksesuaian *internal control* berdasarkan kerangka COSO 2012 bagi divisi kartu kredit Bank “X”?

METODE PENELITIAN

Mini research question 1 bertujuan untuk mengetahui prosedur pengajuan aplikasi kartu kredit sampai penagihan kepada nasabah, karena pada tahap awal inilah yang menjadi fondasi dan mempengaruhi penerapan *internal control* Bank “X”. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi.

Mini research question 2 bertujuan untuk mengetahui kondisi lingkungan *internal control* yang telah diterapkan oleh Bank “X”, karena hal ini akan mempengaruhi kesesuaian antara teori menurut COSO 2012 dan implementasinya sehari-hari. Dengan mengetahui *internal control* yang ada, nantinya dapat dilakukan penilaian terhadap masing-masing komponen *internal control* tersebut sesuai dengan teori menurut COSO 2012. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi.

Mini research question 3 bertujuan untuk mengetahui perbandingan *internal control* Bank “X” dibandingkan kerangka COSO 2012, karena hal tersebut akan membantu peneliti untuk mengetahui apa saja ketidaksesuaian/ kelemahan yang ada di Bank “X”. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi.

Mini research question 4 bertujuan untuk mengetahui dampak yang diakibatkan ketidaksesuaian *internal control* berdasarkan kerangka COSO 2012 bagi divisi kartu kredit Bank “X”. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya fungsi kartu kredit adalah untuk memudahkan orang bertransaksi. Selain mudah digunakan dan mudah dibawa, kartu kredit juga bersifat fleksibel dalam bisnis modern, sehingga tidak sedikit orang yang memilikinya. Pembuatannya cukup mudah namun ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam penyetujuan kartu kredit di Bank “X”. Calon nasabah (*Applicant*) dapat mengisi aplikasi yang diberikan oleh marketing.

Dalam mengisi aplikasi harus disertakan tanda tangan dan dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan pengajuan kartu kredit. Kemudian, dari marketing akan diberikan ke *Team Leader* untuk dilakukan pengecekan terhadap kevalidan dan kelengkapan data dari calon nasabah. Selanjutnya, aplikasi akan diberikan ke bagian

Analyst untuk diproses. Kartu kredit yang telah disetujui dan telah dikirimkan tidak dapat langsung digunakan untuk bertransaksi. Nasabah harus melakukan aktivasi terlebih dahulu. Ketika kartu kredit sudah aktif dan dapat melakukan transaksi, maka *Billing Statement* akan dikirimkan ke nasabah secara langsung atau via *email* (tergantung permintaan). Setelah itu, nasabah wajib membayar sesuai dengan nominal yang tertera dan nasabah juga harus membayar sebelum waktu yang ditentukan, jika tidak, nasabah dapat dikenai denda sebesar Rp 75.000 dan bunga sebesar 3.5%. Nasabah yang tidak membayar kartu kredit / macet antara 120-180 hari dari waktu yang telah ditentukan, akan dikenakan *blacklist* dari pihak Bank.

Pada komponen *control environment* terdapat visi, misi, dan tujuan yang tertulis secara jelas. Selain itu, di Bank “X” juga memiliki kode etik profesional dimana Dewan Komisaris dan Direksi menerapkan komitmen integritas yang memuat aspek-aspek *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Code of Conduct* yang berlaku bagi seluruh karyawan dan Manajemen Bank. Adapun aturan secara tertulis yang harus dipatuhi dan filosofi “*no fraud tolerance*” beserta dengan sanksi yang akan diberikan jika melanggar.

Dalam aktivitasnya sehari-hari, karyawan memiliki tugas dan kewenangan masing-masing sesuai kebijakan Bank sehingga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan otorisasi. Dalam melakukan aktivitas perekrutan dilakukan secara ketat dan juga diberikan fasilitas untuk melakukan *training* dan konsultasi jika diperlukan, serta adanya pemberian insentif sesuai kinerja.

Komponen *risk assessment*, Bank “X” memiliki tujuan yang ingin dicapai secara operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Tercapainya tujuan tersebut harus didukung oleh internal perusahaan. Dalam pelaporan yang dilakukan pun baik laporan *financial* dan *non financial* harus terkandung prinsip keterbukaan (transparansi). Bank “X” tidak hanya mengutamakan laporan *financial* saja, juga diperlukan laporan *non financial*. Laporan tersebut mengandung tanggung jawab social perusahaan (CSR) sebagaimana tercantum dalam UU No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan tujuan operasional dapat disampaikan melalui saluran media untuk produk dan kinerja Bank “X”.

Bank “X” menempatkan mekanisme *risk assessment* sesuai level manajemen menurut *Basel Accord II*. Sebagai contoh untuk bagian kredit, *Risk Management Division* (RMD) Bank “X” melakukan analisis risiko berupa pengukuran sesuai *Basel II* melalui laporan profil risiko secara triwulan. Respon atas dilakukannya analisis risiko, Bank “X” menerapkan *Key Risk Indicators* (KRI) sebagai sinyal peringatan dini berbasis web serta penghitungan dan pemantauan jumlah kejadian berpotensi risiko melalui media menggunakan *Loss Event Recording System* (LERS). Melalui KRI dan LERS maka Bank “X” dapat melakukan mitigasi risiko secara tepat.

Sedangkan *control activities*, pada Bank “X” dilakukan pemisahan tugas antar bagian seperti yang telah diungkapkan di komponen *risk assessment*, pengawasan atas tindakan karyawan dan juga Manajemen Senior, juga adanya evaluasi atas kebijakan dan prosedur yang ada untuk memitigasi risiko. Selain dilakukan secara melekat dalam setiap aktivitas, proses pengendalian risiko dilakukan oleh *Internal Control Department* melalui pemeriksaan kredit dan operasional di cabang secara harian. Penanganan kredit bermasalah pada divisi kartu kredit juga dilakukan oleh divisi terpisah secara independen yang bertugas melakukan penagihan atas kredit-kredit yang mulai bermasalah baik bagi penagihan yang masih dapat ditagih maupun yang tidak dapat ditagih lagi.

Di era globalisasi tidak terlepas dari penggunaan sistem informasi yang disertai teknologi memadai untuk mendukung infrastruktur perusahaan. Untuk kebijakan yang tertulis dapat dilihat pada *website* yang telah dibuat oleh Bank “X” untuk setiap bagian. Menggunakan teknologi database untuk melakukan input nasabah baru, melaporkan complain dari nasabah ke pusat, dan meng-*update* data nasabah apabila diperlukan, namun seringkali sistemnya kurang memadai yang menyebabkan sering terjadi *error* dan loadingnya lama untuk memulai aktivitas.

Secara rutin proses pengendalian risiko kredit SME dilakukan oleh *SME Monitoring Department*. Beberapa aspek pemeriksaan *SME Monitoring Department* antara lain memastikan kepatuhan dalam proses kredit, kondisi pasar/ ekonomi, serta pemantauan situasi *financial*. Sedangkan untuk divisi kartu kredit, terkait dengan masalah sistem informasinya yang masih kurang memadai menyebabkan karyawan membutuhkan waktu dan usaha yang lebih lama untuk melakukan aktivitas dan pelaporan serta penanganan customer.

Selanjutnya *informational and coordination*, informasi yang dibutuhkan Bank “X” untuk mendukung komponen internal control lainnya menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas. Secara internal Bank “X” mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab *internal control* yang harus dilakukan melalui 2 cara, yang meliputi lisan dan tertulis. Informasi tersebut mengandung aturan, prosedur, kebijakan, sanksi, *job description*, wewenang dan tanggungjawabnya. Komunikasi secara lisan dilakukan oleh atasan kepada bawahan setiap harinya melalui *briefing*. Sedangkan komunikasi tertulis disampaikan melalui *web Intranet* yang dapat dibaca oleh seluruh entitas Bank “X” dan juga disediakan buku pedoman manual untuk dibaca oleh masing-masing karyawan.

Komunikasi internal lainnya yang dilakukan oleh Bank “X” adalah mekanisme pelaporan kecurangan (mekanisme *whistleblowing*). Pengelolaan sistem ini merupakan bagian dari sistem *internal control* dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan. Melalui mekanisme tersebut diharapkan segala bentuk kecurangan dan pelanggaran terhadap prosedur dan kode etik perusahaan serta tindakan yang mengandung unsur pidana dapat ditindaklanjuti. Mekanisme *whistleblowing* tidak hanya untuk internal perusahaan saja namun juga disediakan untuk pihak eksternal seperti *complain/* pengaduan dari customer melalui *customer service* maupun pengaduan di web yang disediakan oleh Bank “X”.

Informasi secara internal juga disampaikan melalui RUPS. RUPS sebagai bentuk pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi atas pengelolaan Bank,

mengubah Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta memutuskan pembagian tugas dan tanggung jawab kepengurusan diantara Direksi. Selain itu, Bank sebagai Perseroan Terbatas Terbuka maka diwajibkan untuk menggunakan jasa audit eksternal dalam melakukan pemeriksaan setiap 6 bulan sekali. Adapula laporan yang dipublikasikan ke pihak eksternal mengenai pertanggungjawaban Bank “X” atas aktivitas yang dilakukan, seperti *customer, partner*, dan regulator.

Terakhir *monitoring*, Evaluasi berjalan tidak dilakukan oleh Bank “X” karena karyawan harus melakukan aktivitas berdasarkan kebijakan dan prosedur dan jikalau terjadi perubahan harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Kantor Pusat. Sedangkan evaluasi terpisah dilakukan secara dilakukan setiap harinya oleh atasan, khususnya divisi kartu kredit. Evaluasi tersebut dilakukan oleh *Sub-Branch Manager Credit Card*, dimana setiap marketing yang ada akan dievaluasi kinerjanya.

Internal Control Department Bank “X” seperti yang telah disebutkan di komponen control activities, bertugas untuk melakukan pengawasan berupa pemeriksaan kredit dan operational cabang setiap hari. Hasilnya akan diserahkan kepada Pusat untuk ditindaklanjuti apabila terjadi penyimpangan maupun kelemahan dalam sistem dan kebijakan yang telah diatur. Selain *Internal Control Department* juga terdapat Komite Audit dan SKAI yang melakukan penelaahan atas efektivitas internal control, identifikasi hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris, dan penelaahan tingkat kepatuhan Bank terhadap perundang-undangan.

Namun, untuk divisi kartu kredit Bank “X” tidak terlalu memerlukan pengawasan *Audit Committee* karena divisi tersebut jarang diaudit secara keseluruhan. Audit akan dilakukan berdasarkan case per case. Misal : macet bayar kartu kredit. Untuk investigasi kasus, diturunkan RMU (*Risk Management Unit*) dari divisi *Collection* (Penagihan) yang akan melakukan penyelidikan sampai kasus terselesaikan.

Dari hasil perbandingan antara teori COSO 2012 dan praktek yang dilakukan oleh Bank “X” ditemukan beberapa ketidaksesuaian, antara lain :

1. Pada komponen *control environment*, struktur organisasi yang digunakan oleh Bank “X” hanya *single structure* saja. Dan dampak tidak adanya *multiple structure* adalah tidak dapat melihat konsentrasi risiko disekeliling *customer* yang berbeda, adanya ketergantungan pada *vendor* tunggal, atau kerentanan lainnya. Namun, dampak tersebut dirasakan tidak material bagi Bank “X”.
2. Pada komponen *risk assessment*, tidak ditemukannya data yang mencakup penilaian *fraud risk*. Dampak yang terjadi adalah Tidak adanya antisipasi dan pengelolaan yang tepat terhadap *fraud risk* sehingga dapat terjadi kecurangan pada laporan dan tidak menjamin keamanan asset.
3. Pada komponen *control activities*, meningkatnya jumlah nasabah tahun 2011 sehingga sistemnya tidak mampu menampungnya. Teknologi *database* untuk menginput data, melaporkan *complain* nasabah ke pusat, dan meng-*update* data masih kurang memadai yang menyebabkan sering terjadi *error* dan *loadingnya* lama untuk memulai aktivitas. Dampak yang dihasilkan adalah Sebagai akibatnya terjadi *time consuming* dan kemungkinan risiko atas human error semakin besar sehingga pemberian informasi menjadi tidak relevan.
4. Pada komponen *informational and coordination*, sebagai akibat dari penggunaan sistem yang masih kurang memadai didalam komponen *control activities* maka informasi yang dihasilkan dapat menjadi kurang akurat, kurang ter-*update*, dan memerlukan waktu yang lama untuk mengaksesnya. Bank “X” yang melakukan operasinya setelah sekian lama yang disertai dengan sistemnya yang kurang memadai tidak sepadan untuk *cost and benefitnya*. Dampak yang dihasilkan dari kualitas informasi yang kurang relevan menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan dalam melakukan evaluasi sehingga merugikan perusahaan. Selain itu, *cost* yang harus dikeluarkan oleh Bank “X” menjadi lebih besar, yang seharusnya dapat dialokasikan ke aktivitas yang lebih membutuhkan.

5. Pada komponen *monitoring*, evaluasi berjalan tidak dilakukan didalam Bank “X”, karena semua aktivitas harus berdasarkan aturan dan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan dan jikalau terjadi perubahan harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Pusat. Bank “X” belum memiliki evaluasi berjalan yang dapat secara *flexible* dibangun ke dalam proses bisnis dan disesuaikan dengan perubahan kondisi. SKAI dan Komite Audit tidak melakukan pemeriksaan kepada divisi kartu kredit. Dalam divisi kartu kredit untuk jangkauan dan frekuensi dilakukannya evaluasi terpisah berdasarkan angka delinquency. Apabila angka tersebut meningkat maka akan diturunkan divisi RMU bukan Komite Audit atau SKAI. Hal tersebut dilakukan karena audit yang harus dijalankan terlalu kompleks sehingga menggunakan RMU sebagai auditornya. RMU akan melaksanakan tugasnya setiap ada *case* dan diselesaikan sampai tuntas. Dampaknya meliputi tidak dapat melakukan evaluasi aktivitas manajerial dan pengawasan atas karyawan setiap harinya, kurang memiliki wawasan dari pihak yang secara langsung terlibat pada aktivitas entitas. Sedangkan tidak adanya audit secara periodik dapat menyebabkan terbukanya celah untuk melakukan *fraud* yang dapat merugikan perusahaan. Selain itu, *internal control* yang tidak efektif tidak dapat diketahui dan diatasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bank “X” sebagai badan usaha yang bergerak di bidang perbankan tentunya memiliki berbagai divisi didalam. Adapun beberapa divisi yang dimilikinya, baik divisi *funding*, divisi *operation*, divisi *billing*, dan masih banyak lagi lainnya, namun yang diutamakan adalah divisi kartu kredit.

Internal control yang telah diterapkan oleh Bank “X” hampir seluruhnya telah sesuai dengan kerangka COSO 2012 walaupun ada beberapa ketidaksesuaian yang terjadi didalamnya. Ketidaksesuaian yang terjadi pada komponen *control environment* meliputi tidak adanya *multiple structure* karena Bank “X” masih merasa

belum memerlukannya. Dan sebagai Bank yang masih berkembang, struktur organisasinya masih dapat terus mengalami perubahan. Ketidaksesuaian yang terjadi pada komponen *risk assessment*, yakni tidak adanya penilaian atas *fraud risk*. Dengan tidak adanya penilaian *fraud risk* tersebut dapat meningkatkan risiko potensial dan jika risiko tersebut muncul, maka tidak ada antisipasi yang diberikan sehingga dapat dimungkinkan kerugian yang akan dihasilkan semakin besar.

Pada komponen *control activities* dan komponen *informational and coordination* saling berkaitan. Dimulai dari ketidakmampuan sistem yang digunakan oleh Bank “X” untuk menampung jumlah nasabah yang meledak pada tahun 2011, dan apabila dilakukan penambahan kuota membutuhkan biaya yang sangat besar. Akibatnya, arus informasi didalamnya menjadi terganggu. Informasi yang dihasilkan kurang relevan dan *cost and benefit* yang dihasilkan tidak sepadan.

Yang terakhir, ketidaksesuaian pada komponen *monitoring*, dimana pada divisi kartu kredit Bank “X” tidak dilakukan audit secara periodik oleh Komite Audit dan SKAI. Divisi kartu kredit tersebut hanya akan melakukan audit saat terjadi kenaikan angka *delinquency*, dan *team audit* yang diturunkan berasal dari divisi penagihan yang disebut dengan RMU (*Risk Management Unit*). RMU yang nantinya akan melakukan penyidikan sekaligus penagihan sampai kasus terselesaikan. Dan untuk saat ini *internal control* yang dimiliki oleh Bank “X” masih tergolong baik serta dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Bank “X” juga dirasa cukup siap untuk menyongsong COSO 2012.

COSO 2012 dapat membantu dalam mengatasi kelemahan yang terjadi di Bank “X”, seperti penggunaan *multiple structure*, adanya penilaian atas *fraud risk*, melakukan audit secara periodik terhadap seluruh divisi yang ada, serta pentingnya teknologi yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasionalnya sehari-hari. Namun semuanya ini tampaknya belum disadari oleh badan usaha seperti Bank X. Penerapan aktivitas yang disesuaikan dengan kerangka COSO 2012 dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari internal control perusahaan, juga dapat

memitigasi risiko, dan mengurangi celah kelemahan atas kebijakan dan prosedur yang ada sehingga dapat meminimalkan kerugian yang terjadi.

Adanya beberapa dari praktik yang diterapkan oleh Bank “X” tidak dapat dituliskan disebabkan kurangnya data yang diperoleh sehingga bagian tersebut dengan terpaksa harus diabaikan. Kurangnya data yang didapatkan mengakibatkan gambaran *internal control* didalam Bank “X” tidak dapat diketahui secara menyeluruh. Oleh karena itu, penulis berharap dimasa mendatang bisa mendapatkan data yang lebih lengkap untuk melakukan studi lebih lanjut terkait implementasi *internal control* yang beracuan pada kerangka COSO 2012, khususnya pada penilaian atas *fraud risk* sehingga dapat diketahui gambaran *internal control* yang terkandung didalam Bank “X” secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanina, Ruzanna. **EVALUASI TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PROSES PEMBERIAN KREDIT MIKRO” (Studi pada PT. Bank Mandiri (PERSERO) tbk Cabang Majapahit Semarang).** http://eprints.undip.ac.id/26647/1/JURNAL-Ruzanna_Amanina_C2C607134_.pdf (diakses tanggal 23 September 2012)
- Banker Association for Risk Management (BARa). 2012. **Modul Uji Kompetensi Profesi Bankir Bidang Manajemen Risiko Level 1.** Edisi ke 3. Jakarta
- Barakat, Abdullah. 2009. **BANKS BASEL II NORMS REQUIREMENT REGARDING INTERNAL CONTROL.** <http://delhibusinessreview.org/d.pdf> (diakses pada tanggal 11 Januari 2013)
- COSO. 2012. **Internal Control – Integrated Framework.** http://www.coso.org/documents/coso_framework_body_v6.pdf (diakses tanggal 1 Agustus 2012)
- Efferin, Sujoko. Stevanus H. Darmadji. Dan Yuliawati Tan. 2008. **Metode Penelitian Akuntansi : Mengungkapkan Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, edisi pertama.** Yogyakarta, Indonesia : Graha Ilmu
- Ernst & Young. 2010. **Improving Internal Controls : The Ernst & Young Guide for Humanitarian Aid Organizations.** [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Improving_internal_controls/\\$FILE/Improving-internal-controls_Overview.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Improving_internal_controls/$FILE/Improving-internal-controls_Overview.pdf) (diakses tanggal 9 September 2012)
- Hall, James A. 2008. **Accounting Information System**, 6th edition. Ohio, U.S.A : Cengage Learning
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. **Dasar-Dasar Perbankan.** Jakarta : Bumi Aksara.
- Hermiyetti. 2010. **Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang.** <http://journal.uui.ac.id/index.php/JAAI/article/viewFile/2252/2054> (diakses pada tanggal 6 September 2012)
- Kasmir. 2010. **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.** Jakarta : Rajawali Pers.
- Mulyadi. 2001. **Sistem Akuntansi.** Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Suyono, Jusup Agus. Ujang Sumarwan. 2009. **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan, Penggunaan, Pembayaran, dan Peluang Terjadinya Gagal Bayar dalam Bisnis Kartu Kredit.** <http://ujangsumarwan.blog.mb.ipb.ac.id/files/2010/07/2009-UJANG-SUMARWAN-CREDIT-CARD-OWNERSHIP-USAGE-PAYMENT-DEFAULT.pdf> (diakses pada tanggal 6 Mei 2012)

Tampubolon, Robert. 2005. **Risk and Systems – based Internal Auditing**. Jakarta : Elex
Media Komputindo